KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : KU.204/3/19/STJ/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Percepatan Pengisian Capaian Realisasi pada Aplikasi e-Monev Periode Triwulan II TA 2026

Jakarta, 30 Juni 2026

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian PPN/BAPPENAS Nomor: B-12684/Dt.10.01/ME.01.01/06/2026 tanggal 23 Juni 2026 perihal Pengingat Masa Pelaporan Triwulan II dan Pengisian Indikator Kinerja untuk Lampiran Pidato Kenegaraan RI pada Aplikasi e-Monev Tahun 2026, dapat kami informasikan bahwa Kementerian Perhubungan perlu melakukan pelaporan capaian realisasi Triwulan II TA 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Saudara dapat melaporkan capaian realisasi dimaksud melalui aplikasi e-Monev Generasi 4 pada link/tautan berikut: (http://e-monev.bappenas.go.id) sebelum tanggal **20 Juli 2026 pukul 23.59 WIB** guna kami proses verifikasi lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Agustina Dani Endahwati
NIP. 19670824 199403 2 002

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Dirjen dan Kepala Badan di lingkungan Kemenhub.

Lampiran I Surat Kepala Biro Perencanaan
Nomor : KU.204/3/19/STJ/2026
Tanggal : 30 Juni 2026

Kepada Yth.:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
3. Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut;
4. Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara;
5. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
6. Sekretaris Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda;
7. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
8. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi;
9. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
10. Kepala Biro Keuangan;
11. Kepala Biro Hukum;
12. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
13. Kepala Biro Umum;
14. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
15. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi;
16. Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
17. Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi;
18. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
19. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi;
20. Kepala Sekretariat Komite Nasional KeselamatanTransportasi;
21. Ketua Mahkamah Pelayaran.

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-12684/Dt.10.01/ME.01.01/06/2026 Jakarta, 23 Juni 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengingat Masa Pelaporan Triwulan II dan Pengisian Indikator Kinerja untuk Lampiran Pidato Kenegaraan RI pada Aplikasi e-Monev Tahun 2026

Yth. Kepala Biro Perencanaa Kementerian/Lembaga
di Tempat

Dalam rangka melakukan pengendalian pelaksanaan rencana kerja yang lebih baik untuk mencapai target pembangunan, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada K/L yang telah melakukan pelaporan dan verifikasi pada Triwulan I (informasi terkait ringkasan pelaporan kami sampaikan dalam lampiran).

Selanjutnya, sehubungan telah dimulainya masa **pelaporan Triwulan II** dan dalam rangka persiapan **penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan RI Tahun 2026**, bersama ini kami sampaikan bahwa pelaporan dimaksud melalui Aplikasi e-Monev sudah dapat dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan beberapa hal terkait:

1. Pelaporan pelaksanaan *Critical Path* Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dan Rincian Output Kunci bagi K/L terkait, paling lambat dilaksanakan pada **10 Juli 2026**;
2. Pelaporan pelaksanaan Renja K/L Level Komponen dan Rincian Output, paling lambat dilaksanakan pada **20 Juli 2026**;
3. Pelaporan Indikator Kinerja (IKK, IKP, dan IKSS) dalam rangka penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan RI, paling lambat dilaksanakan pada **20 Juli 2026**;
4. Melakukan verifikasi terhadap data yang dilaporkan pada e-Monev paling lambat **20 Juli 2026**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. Informasi lebih lanjut terkait aplikasi e-Monev dapat diperoleh dengan menghubungi:

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko
JL. Taman Suropati No.2, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
Telp/fax: 021-50927412
e-mail: laporan.pp39@bappenas.go.id

Direktur Sistem dan Manajemen Risiko,



Prakosa Grahayudiandono

Tembusan:
Deputi Bidang Pengendalian Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan (sebagai laporan).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat
Nomor : B-12684/Dt.10.01/ME.01.01/06/2026
Tanggal : 23 Juni 2026

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI PENERIMA SURAT DINAS

Yth. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Mahkamah Agung;
5. Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Kementerian Sekretariat Negara;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Keuangan;
11. Kementerian Pertanian;
12. Kementerian Perindustrian;
13. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Kementerian Perhubungan;
15. Kementerian Kesehatan;
16. Kementerian Agama;
17. Kementerian Ketenagakerjaan;
18. Kementerian Sosial;
19. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
20. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
21. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
22. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
23. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
25. Badan Intelijen Negara;
26. Badan Siber dan Sandi Negara;
27. Badan Pusat Statistik;
28. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
29. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
30. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
31. Kementerian Komunikasi dan Digital;
32. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
33. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
34. Lembaga Ketahanan Nasional;
35. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
36. Badan Narkotika Nasional (BNN);
37. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan; dan Keluarga Berencana Nasional;
38. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
39. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
40. Komisi Pemilihan Umum;
41. Mahkamah Konstitusi RI;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

42. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
43. Badan Informasi Geospasial (BIG);
44. Badan Standardisasi Nasional (BSN);
45. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
46. Lembaga Administrasi Negara;
47. Arsip Nasional Republik Indonesia;
48. Badan Kepegawaian Negara;
49. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
50. Kementerian Perdagangan;
51. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
52. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
53. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
54. Komisi Yudisial Republik Indonesia;
55. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
56. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
57. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
58. Badan Sar Nasional;
59. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
60. Ombudsman Republik Indonesia;
61. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP);
62. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam);
63. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
64. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
65. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
66. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
67. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang);
68. Badan Keamanan Laut;
69. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
70. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
71. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
72. Badan Pangan Nasional;
73. Otorita Ibu Kota Nusantara;
74. Badan Karantina Indonesia;
75. Badan Gizi Nasional;
76. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
77. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
78. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
79. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
80. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
81. Kementerian Hukum;
82. Kementerian Hak Asasi Manusia;
83. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
84. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
85. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
86. Kementerian Kebudayaan;
87. Kementerian Haji dan Umrah;
88. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

89. Kementerian Kehutanan;
90. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
91. Kementerian Pekerjaan Umum;
92. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
93. Kementerian Pariwisata;
94. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
95. Kementerian Koperasi;
96. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
97. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
98. Kementerian Transmigrasi; dan
99. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Direktur Sistem dan Manajemen Risiko,

Prakosa Grahayudiandono

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).